

DAFTAR PUSTAKA

- Djarwanto (1984). *Pokok-pokok Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta : BPFE
- Harnanto (1985). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : BPFE
- Ikatan Akuntan Indonesia (2002). *Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (per 1 April 2002)*. Jakarta . Salemba Empat
- Institute for Economic and Financial Research:ECFIN (2002). *Indonesia Capital Market Directory 2002*. Thirteenth Edition. Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 198/KM/K.016/1998 tanggal 24 maret 1998*
- Mamduh M H dan Abdul H (1996). *Analisis Laporan keuangan*. Yogyakarta : UPP-AMP YKPN
- Martono dan Agus Hardjito (2001). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia
- Nick Apostolou. D Lawrence Crumbley (1993). *Memahami Laporan & Berita Keuangan*. Jakarta : PT Elex Media komputindo
- S. Munawir (2001). *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi keempat. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta
- Zulian Yamit (2000). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta : Ekonisia

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 198/KMK.016/1998 tanggal 24 Maret 1998)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. Bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka, perlu dilandasi dengan sarana sistem penilaian kesehatan BUMN yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali sistem penilaian kinerja BUMN yang dapat mencerminkan kondisi kesehatan perusahaan dengan memperhatikan kaedah penilaian kesehatan perusahaan yang berlaku umum;
- c. bahwa perubahannya tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 9 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (BN No. 1776 hal. 9A-10A) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (BN No. 5686 hal. 1B-212) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 (BN No. 6121 hal. 4B-10B) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 (BN No. 6118 hal. 15B-18B) tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Pasal 2

Penilaian tingkat kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri.

BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada Lampiran I.

BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

BAB II
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
Pasal 3

(1) Tingkat kesehatan BUMN digolongkan menjadi :

- a. SEHAT, yang terdiri dari :
AAA apabila total skor (TS) lebih besar dari 95
AA apabila 90 < TS < = 95
A apabila 65 < TS < = 80
- b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
BBB apabila 50 < TS < = 65
BB apabila 40 < TS < = 50
B apabila 30 < TS < = 40
- c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
CCC apabila 20 < TS < = 30
CC apabila 10 < TS < = 20
C apabila TS < = 10

(2) Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :

- a. Aspek Keuangan.
- b. Aspek Operasional.
- c. Aspek Administrasi.

(3) Penilaian tingkat kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

(4) Penilaian tingkat kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum.

BAB III
BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN
Pasal 4

- (1) Penilaian tingkat kesehatan BUMN yang bergerak dibidang non jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur yang selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan sebagaimana pada lampiran I.
- (2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN NON INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan BUMN.

Pasal 5

(1) BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :

- a. Pembangunan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
- b. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
- c. Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
- d. Bendungan dan irigasi.

(2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan BUMN.

(3) BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

Pasal 6

Indikator penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional Aspek Administrasi BUMN yang bergerak di bidang usaha non keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara Penilaian kat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran II).

BAB IV

BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN

Pasal 7

Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan akan antara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha ankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

Pasal 8

Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan indikator penilaian Aspek Keuangan, ek Operasional dan Aspek Administrasi ditetapkan dengan utusan Menteri Keuangan tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

BUMN wajib menerapkan penilaian tingkat kesehatan AN berdasarkan keputusan ini kepada Anak Perusahaan BUMN jai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang ber- gkatan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala kete- n yang bertentangan dengan keputusan ini dianggap tidak aku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian tingkat ehatan BUMN tahun buku 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan igumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita ara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 1998
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
FUAD BAWAZIER

LAMPIRAN 1:

TABEL KELOMPOK BUMN
INFRASTRUKTUR DAN NON INFRASTRUKTUR

NO. BUMN INFRASTRUKTUR	NO. BUMN NON INFRASTRUKTUR
1. ANGKASA PURA I, PT	29. INDUSTRI PESANAN TERBANG MUSANTARA, PT
2. ANGKASA PURA II, PT	30. INDUSTRI SUNDANG I, PT
3. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN, PT	31. INDUSTRI SUNDANG II, PT
4. DAMRI, PERUM	32. INDUSTRI SOFI, INDONESIA, PT
5. JASA MARGA, PT	33. INDUSTRI TELKOMUNIKASI INDONESIA, PT
6. JASA TIRTA, PERUM	34. INHUTANI I, PT
7. KERET API, PERUM	35. INHUTANI II, PT
8. KOTORITA JATILUHUR, PERUM	36. INHUTANI III, PT
9. PPD, PERUM	37. INHUTANI IV, PT
10. PEL. INDONESIA I, PT	38. INHUTANI V, PT
11. PEL. INDONESIA II, PT	39. ISTAJA KARYA, PT
12. PEL. INDONESIA III, PT	40. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG, PT
13. PEL. INDONESIA IV, PT	41. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA, PT
14. PERUMNAS, PERUM	42. KAWASAN INDUSTRI CILACAP, PT
15. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA, PT	43. KAWASAN INDUSTRI MAKASAR, PT
16. PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA, PERUM	44. KAWASAN INDUSTRI MEDAN, PT
	45. KERTAS KRAFT ACEH, PT
	46. KERTAS LECEK, PT
	47. KERTAS PADALARANG, PT
	48. KIMIA FARMA, PT
	49. KLIRING DAN JAMINAN BURSA KOMODITI, PT
	50. KONEHA, PT
	51. KRAKATAU STEEL, PT
	52. LEN INDUSTRI, PT
	53. MEGA ELTRA, PT
	54. MERPATI MUSANTARA AIRWAYS, PT
	55. MATOUR, PT
	56. NINDYA KARYA, PT
	57. PAL INDONESIA, PT
	58. PRASADA PAMUNAN LIMBAH, PT
	59. PULAU BATAM, PT
	60. PELAYARAN BAHITERA ADHIGUNA, PT
	61. PELNI, PT
	62. PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PT
	63. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI, PT
	64. PENCERUKAN INDONESIA, PT
	65. PERCETAKAN NEGARA RI, PERUM
	66. PERIKANAN MUSANTARA, PT
	67. PERKEBUNAN MUSANTARA I, PT
	68. PERKEBUNAN MUSANTARA II, PT
	69. PERKEBUNAN MUSANTARA III, PT
	70. PERKEBUNAN MUSANTARA IV, PT
	71. PERKEBUNAN MUSANTARA IX, PT
	72. PERKEBUNAN MUSANTARA V, PT
	73. PERKEBUNAN MUSANTARA VI, PT
	74. PERKEBUNAN MUSANTARA VII, PT
	75. PERKEBUNAN MUSANTARA VIII, PT
	76. PERKEBUNAN MUSANTARA X, PT
	77. PERKEBUNAN MUSANTARA XI, PT
	78. PERKEBUNAN MUSANTARA XII, PT
	79. PERKEBUNAN MUSANTARA XIII, PT
	80. PERKEBUNAN MUSANTARA XIV, PT
	81. PERURI, PERUM
	82. PERUSAHAAN GAS NEGARA, PT
	83. PERHUTANI, PERUM
	84. PERHOTELAN DAN PERKANTORAN INDONESIA, PT
	85. PERTANI, PT
	86. PINDAD, PT
	87. POS INDONESIA, PT
	88. PRADHYA PARAMITA, PT
	89. PRODUKSI FILM NEGARA, PERUM
	90. PUPUK SRIVIDJAJA, PT
	91. RAJAWALI MUSANTARA INDONESIA, PT
	92. SANG HYANG SERI, PT
	93. SARANA KARYA, PT
	94. SARINAH, PT
	95. SEMEN BATURAJA, PT
	96. SEMEN RUPANG, PT
	97. SUKOPINDO, PT
	98. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT, PT
	99. SURVEY UDARA, PT
	100. SURVEYOR INDONESIA, PT
	101. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM, PT
	102. TWC BOKOBUDUR, PRAMBANAN DAN RAJU BOKO, PT
	103. VIRAMA KARYA, PT
	104. WASKITA KARYA, PT
	105. WIJAYA KARYA, PT
	106. YODYA KARYA, PT
	107. VARUNA TIRTA PRAKARSA, PT

LAMPIRAN 1

LEMBARAN II :

**TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEMATAN
BUMN NON JASA KEUANGAN**

SPES KEDANGAN

- Total Bobot
- BUMN INFRASTRUKTUR (Infra) 50
- BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non infra) 70

Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya. Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 : Daftar indikator dan bobot aspek keuangan.

Indikator	B o b o t	
	Infra	Non Infra
1. Imbalan kpd pemegang saham (ROE)	15	20
2. Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. Collection periods	4	5
6. Perputaran persediaan	4	5
7. Perputaran total asset	4	5
8. Rasio modal sendiri terhadap total Aktiva	6	10
Total Bobot	50	70

Metode Penilaian

1. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

Rumus

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Definisi :

- Laba Setelah Pajak adalah Laba Setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :
 - * Aktiva Tetap
 - * Aktiva Non Produktif
 - * Aktiva lain-lain
 - * Saham Penyertaan Langsung.
- Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal Sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal Sendiri tersebut diatas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan adalah posisi pd akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel 2 : Daftar skor penilaian ROE

ROE (%)	S k o r	
	Infra	Non Infra
15 < ROE	15	20
13 < ROE <= 15	13,5	18
11 < ROE <= 13	12	16
9 < ROE <= 11	10,5	14
7,9 < ROE <= 9	9	12
6,6 < ROE <= 7,9	7,5	10
5,3 < ROE <= 6,6	6	8,5
4 < ROE <= 5,3	5	7
2,5 < ROE <= 4	4	5,5
1 < ROE <= 2,5	3	4
< ROE <= 1	1,5	2
ROE <= 0,5	1	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) mempunyai ROE 10%, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE adalah 14..

Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)

Rumus

$$ROI = \frac{EBIT - \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :
 - > Aktiva Tetap
 - > Aktiva Lain-lain
 - > Aktiva Non Produktif
 - > Saham penyertaan langsung.
- Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Depleksi.
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 3 : Daftar skor penilaian ROI.

ROI (%)	S k o r	
	Infra	Non Infra
18 < ROI	10	15
15 < ROI <= 18	9	13,5
13 < ROI <= 15	8	12
12 < ROI <= 13	7	10,5
10,5 < ROI <= 12	6	9
9 < ROI <= 10,5	5	7,5
7 < ROI <= 9	4	6
5 < ROI <= 7	3,5	5
3 < ROI <= 5	3	4
1 < ROI <= 3	2,5	3
0 < ROI <= 1	2	2
ROI <= 0	0	1

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki ROI 14%, maka sesuai tabel 3 skor untuk indikator ROI adalah 8.

c. Rasio Kap/Cash Ratio

Rumus

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Srt Berharga Jgk Pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi

- Kas, Bank dan Surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 4 : Daftar skor penilaian cash ratio

Cash Ratio = x (%)	S k o r	
	Infra	Non Infra
X >= 35	3	5
25 < X <= 35	2,5	4
15 < X <= 25	2	3
10 < X <= 15	1,5	2
5 < X <= 10	1	1
0 < X <= 5	0	0

Contoh perhitungan

PT "A" (BUMN Infra) memiliki cash ratio sebesar 32%, maka sesuai tabel 4 skor untuk indikator cash ratio adalah 2,5.

d. Rasio Lancar/Current Ratio

Rumus :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi

- Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 5 : Daftar skor penilaian current ratio

Current Ratio = X (%)	S k o r	
	Infra	Non Infra
125 <= X	3	5
110 <= X < 125	2,5	4
100 <= X < 110	2	3
95 <= X < 100	1,5	2
90 <= X < 95	1	1
X < 90	0	0

Contoh perhitungan

PT "A" (BUMN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115%, maka sesuai tabel 5 skor untuk indikator Current Ratio adalah 4.

c. Collection Periods (CP)

Rumus

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi

- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

Tabel 6 : Daftar skor penilaian collection periods

PP = X (hari)	Perbaikan = X (hari)	S k o r	
		Infra	Non Infra
X <= 60	X >= 35	4	5
60 < X <= 90	30 < X <= 35	3,5	4,5
90 < X <= 120	25 < X <= 30	3	4
120 < X <= 150	20 < X <= 25	2,5	3,5
150 < X <= 180	15 < X <= 20	2	3
180 < X <= 210	10 < X <= 15	1,6	2,4
210 < X <= 240	6 < X <= 10	1,2	1,8
240 < X <= 270	3 < X <= 6	0,8	1,2
270 < X <= 300	1 < X <= 3	0,4	0,6
300 < X	0 < X <= 1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 6 diatas.

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :
PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.
Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :
- Tingkat Collection Periods : 4
- Perbaikan Collection Periods (7 hari) : 3,5
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4

Contoh 2 :
PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.
Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :
- Tingkat Collection Periods : 1,2
- Perbaikan Collection Periods (32 hari) : 3,5
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

f. Perputaran Persediaan (PP)

Rumus

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Definisi

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha Dalam tahun buku yang

Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP = X (hari)	Perbaikan (hari)	S k o r	
		Infra	Non Infra
X <= 60	35 < X	4	5
60 < X <= 90	30 < X <= 35	3,5	4,5
90 < X <= 120	25 < X <= 30	3	4
120 < X <= 150	20 < X <= 25	2,5	3,5
150 < X <= 180	15 < X <= 20	2	3
180 < X <= 210	10 < X <= 15	1,6	2,4
210 < X <= 240	6 < X <= 10	1,2	1,8
240 < X <= 270	3 < X <= 6	0,8	1,2
270 < X <= 300	1 < X <= 3	0,4	0,6
300 < X	0 < X <= 1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 7 diatas:

Contoh Perhitungan

Contoh 1 :
PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.
Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :
- Tingkat Perputaran Persediaan : 3
- Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

Contoh 2 :
PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.
Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :
- Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2
- Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

g. Perputaran Total Aset/Total Asset Turn Over (TATO)

Rumus :

$$TATO = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Usaha Tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap.
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total aset

TATO = X (%)	Perbaikan = X (%)	S k o r	
		Infra	Non Infra
120 < X	20 < X	4	5
105 < X <= 120	15 < X <= 20	3,5	4,5
90 < X <= 105	10 < X <= 15	3	4
75 < X <= 90	5 < X <= 10	2,5	3,5
60 < X <= 75	0 < X <= 5	2	3
40 < X <= 60	X <= 0	1,5	2,5
20 < X <= 40	X <= 0	1	2
X <= 20	X <= 0	0,5	1,5

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas.

Contoh perhitungan

Contoh 1 :
PT "A" (BUMN Non Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Aset sebesar 70% dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari.
Sesuai tabel 8 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :
- Tingkat Perputaran Total Aset : 3
- Perbaikan Perputaran Total Aset (10%) : 3,5
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

Contoh 2 :
PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Aset 100% dan pada tahun 1998 sebesar 98%.
Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :
- Tingkat Perputaran Total Aset : 1,5
- Perbaikan Perputaran Total Aset (10%) : 2,5
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 2,5

h. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset (TMS terhadap Total Asset)

Rumus

$$TMS \text{ thd TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Definisi

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 9 : Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

TMS thd TA (%) > X	S k o r	
	Infra	Non Infra
X <= 0	0	0
0 < X <= 10	2	4
10 < X <= 20	3	6
20 < X <= 30	4	7,25
30 < X <= 40	6	10
40 < X <= 50	5,5	9
50 < X <= 60	5	8,5
60 < X <= 70	4,5	8
70 < X <= 80	4,25	7,5
80 < X <= 90	4	7
90 < X <= 100	3,5	6,5

Contoh perhitungan
PT "B" (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35%, maka sesuai tabel 9 skor untuk indikator rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset adalah 10.

ASPEK OPERASIONAL

Total bobot	
BUMN INFRASTRUKTUR	35
BUMN NON INFRASTRUKTUR	15

Indikator yang dinilai indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka memunculkan keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa indikator penilaian yang dapat digunakan adalah sebagaimana dalam Contoh Indikator Aspek Operasional*.

Jumlah indikator Jumlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal 2 (dua) indikator maksimal 5 (lima) indikator, dimana apabila dipandang perlu indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan telah mencapai tingkat/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih dominan pada tahun yang bersangkutan.

Metode penilaian dan kategori penilaian Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kumulatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut :

- Baik sekali (RS) : skor = 100% X Bobot indikator yang bersangkutan.
- Baik (S) : skor = 80% X Bobot indikator yang bersangkutan.
- Cukup (C) : skor = 50% X Bobot indikator yang bersangkutan.
- Kurang (K) : skor = 20% X Bobot indikator yang bersangkutan.

Nilai untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut :

- Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu, dsb.) dan kuantitas (produktivitas, rendemen, dan sebagainya).
- Baik : Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen, dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu, dan sebagainya).
- Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu, dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen, dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.
- Kurang : Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal.

Mekanisme Penilaian

- Penetapan indikator dan penilaian masing-masing bobot.
- Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum pada pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan perusahaan.
- Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum.
- Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebut, Komisaris/Dewan Pengawas wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya.
- Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum sekaligus menetapkan indikator operasional yang digunakan untuk tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain mempertimbangkan usul Komisaris/Dewan Pengawas tersebut diatas.
- Khusus untuk penilaian tingkat kesehatan tahun buku 1998, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang penilaian tingkat kesehatannya diatur dengan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan usul tentang indikator-indikator aspek operasional yang akan digunakan berikut masing-masing bobotnya kepada Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.

b. Mekanisme penetapan nilai

- Sebelum diselenggarakan RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator-indikator aspek operasional dan bobot yang

telah ditetapkan oleh RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan.

- Dalam menyampaikan usulan penilaian tersebut Komisaris/Dewan Pengawas diharuskan memberikan justifikasi atas penilaian terhadap masing-masing indikator aspek operasional yang digunakan.
- RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum dalam pengesahan laporan keuangan menetapkan penilaian terhadap aspek operasional yang antara lain memperhatikan usulan Komisaris/Dewan Pengawas.

6. Contoh Perhitungan

BUMN Pelabuhan (Infrastruktur).

Indikator yang digunakan	Bobot	Nilai	Skor	Unsur-unsur yang dipertimbangkan
1. Pelayanan kepada pelanggan/masyarakat	15	B	12	Turn Round Time (TRT), Waiting Time (WT), dsb.
2. Peningkatan kuantitas SDM	10	C	5	Peningkatan Kesejahteraan, Kaderisasi pimpinan, dsb.
3. Research & Development	10	B	8	Kepedulian manajemen terhadap R & D, dsb.
T o t a l	35		25	

III. ASPEK ADMINISTRASI

1. Total Bobot
 - BUMN INFRASTRUKTUR (Infra) 15
 - BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non Infra) 15
2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya
 Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 10 dibawah ini.

Tabel 10. Daftar indikator dan bobot aspek Administrasi

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Laporan Perhitungan Tahunan	3	3
2. Rancangan RKAP	3	3
3. Laporan Periodik	3	3
4. Kinerja PUKK	6	6
T o t a l	15	15

3. Metode penilaian

a. Laporan Perhitungan Tahunan

- Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.

- Penentuan nilai

Tabel 11. Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit

Jangka waktu laporan Audit diterima	Skor
- sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	3
- sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	2
- lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	0

- Contoh Perhitungan :
 Laporan audit terhadap laporan perhitungan tahunan BUMN PT "A" (periode tahun buku 1/1/1997 sampai dengan 31/12/1997) diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) pada tanggal 2 Mei 1998. Sesuai tabel 11 diatas, nilai PT "A" untuk ketetapan waktu penyampaian laporan perhitungan tahunan adalah 2.

b. Rancangan RKAP

- Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998, RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.

Penentuan....

Penentuan nilai

Tabel 12 : Daftar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP

Jangka waktu surat diterima s/d memasuki tahun anggaran yang bersangkutan	Skor
2 bulan atau lebih cepat kurang dari 2 bulan	3 0

Contoh 1 : Tahun anggaran BUMN PT "A" dimulai 1/1 1999. Rancangan RKAP BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 29 Oktober 1998. Sesuai tabel 12 diatas pada butir diatas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 3

Contoh 2 : Tahun anggaran BUMN PT "A" dimulai 1/1 1999. Rancangan RKAP BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 5 Desember 1998. Sesuai tabel 12 diatas pada butir diatas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 0.

Laporan Periodik

- Waktu penyampaian laporan. Laporan periodik Triwulan harus diterima oleh Komisaris/ Dewan Pengawas dan Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.

Penentuan nilai

Tabel 13 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Periodik

Jumlah keterlambatan dalam 1 bulan	Skor
lebih kecil atau sama dengan 0 hari	3
0 < x <= 30 hari	2
30 < x <= 60 hari	1
> 60 hari	0

Contoh perhitungan Laporan periodik Triwulan PT "S" periode anggaran 1 Januari s/d 31 Desember untuk tahun penilaian diterima Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum masing-masing sebagai berikut :

Triwulan	Berakhir periode	Tanggal diterima
I	31/3 199x	5/5 199x
II	30/6 199x	15/7 199x
III	30/9 199x	31/10 199x
IV	31/12 199x	10/2 199x + 1

- Perhitungan jumlah hari keterlambatan
 - Triwulan I 4
 - Triwulan II 0
 - Triwulan III 0
 - Triwulan IV 9

Jumlah hari keterlambatan 13 sehingga mendapatkan nilai "2"

Catatan :

- Laporan periodik sekurang-kurangnya terdiri dari :
1. Laporan pelaksanaan RKAP
 2. Laporan pelaksanaan Proyek Pengembangan
 3. Laporan pelaksanaan Anak Perusahaan
 4. Laporan pelaksanaan penugasan (jika ada)
 5. Laporan pelaksanaan PUKK

d. Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

Indikator yang dinilai

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Efektivitas penyaluran	3	3
2. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman	3	3
T o t a l	6	6

Metode penilaian masing-masing indikator

d.1. Efektivitas penyaluran dana

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100\%$$

Definisi

Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas :

- Saldo awal
- Pengembalian pinjaman
- Setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana PUKK BUMN lain, jika ada).
- Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK.

Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dan penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan).

Tabel 14 : Daftar penilaian tingkat penyerapan dana PUKK

Penyerapan (%)	> 90	85 s/d 90	80 s/d 85	< 80
Skor	3	2	1	0

Contoh perhitungan :

Jumlah dana yang tersedia pada BUMN PT "A" dalam tahun 1999 adalah sebesar Rp 10.000 terdiri dari :

Saldo awal tahun 1999	Rp	500
Pengembalian pinjaman	Rp	5.000
Setoran eks pembagian laba selama tahun yang bersangkutan	Rp	4.000
Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK	Rp	500
Jumlah	Rp	10.000

Jumlah dana yang disalurkan oleh BUMN PT "A" Tahun 1999 Rp 9.500 terdiri dari :

- Pinjaman Rp 3.500
- Hibah Rp 1.000

Efektivitas penyaluran dana = $\frac{9.500}{10.000} \times 100\% = 95\%$
 Sesuai dengan tabel 14 diatas maka skor untuk indikator yang bersangkutan adalah "3"

d.2 Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman

Rumus :

$$\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$$

Definisi

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut :

- Lancar 100%
- Kurang lancar 75%
- Ragu-ragu 25%
- Macet 0%

Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 15 : Daftar penilaian tingkat pengembalian dana PUKK

Penyerapan (%)	> 70	40 s/d 70	10 s/d 40	< 10
Skor	3	2	1	0

Contoh perhitungan

Posisi pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi BUMN PT "A" di akhir tahun buku 1999 adalah Rp 3.000 juta, terdiri dari (Rp juta) :

Lancar	1.500
Kurang lancar	500
Ragu-ragu	900
Macet	100
Jumlah	3.000

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah sebagai berikut :

Lancar	1.500	X	100%	=	1.500
Kurang lancar	500	X	75%	=	375
Ragu-ragu	900	X	25%	=	225
Macet	100	X	0%	=	0

Jumlah rata-rata tertimbang 2.100

Tingkat....

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah
 $\frac{2.100}{3.800} \times 100 = 70\%$
 3.800

Sesuai dengan tabel 15 diatas maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah "2".

7. LAIN-LAIN

- Dalam penilaian tingkat kesehatan BUMN, Direksi diberikan opsi untuk tidak memperhitungkan proyek/investasi pengembangan yang sudah dinyatakan operasi komersial menurut standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau standar umum yang berlaku untuk BUMN tersebut selama 2 (dua) tahun apabila :
 - a. Dalam 2 tahun sejak operasi komersial, proyek/investasi pengembangan dimaksud belum mencapai utilisasi sebesar 60% atau,
 - b. Periode operasi komersial dengan utilisasi diatas 60% dalam satu tahun penilaian kurang dari 9 bulan.
- Dalam hal proyek/investasi pengembangan tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, maka Direksi harus memastikan secara tegas laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laba/rugi dan Aliran Kas untuk proyek/investasi pengembangan dimaksud dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya perhitungan tingkat kesehatan hanya didasarkan atas laporan keuangan perusahaan diluar laporan keuangan proyek/investasi pengembangan.

CONTOH INDIKATOR ASPEK OPERASIONAL

INDIKATOR	UNSUR-UNSUR YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN	CONTOH APLIKASI TERHADAP UNSUR-UNSUR YG DIPERTIMBANGKAN			
		BUMN/SEKTOR	UNSUR-UNSUR YG DPT DIPERTIMBANGKAN		
Pelayanan kepada pelanggan/masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> > Perbaikan kualitas sarana & prasarana untuk kepentingan/kepuasan pelanggan > Ketersediaan pelayanan purna jual (after sales service). > Perbaikan mutu produk > Pengembangan jalur distribusi > Penyelenggaraan birokrasi yang menguntungkan bagi pelanggan > Kecepatan pelayanan > Guidance yang jelas bagi pelanggan > Peningkatan fasilitas keselamatan bagi pelanggan/pemakai jasa > Pelayanan gangguan/troubles. 	Pelabuhan	Turn Round Time (TRT), Berthing Time (BT), Waiting Time (WT), dsb.		
		Pengairan (Perum Kota-rita Jati-luhur dan Perum Jasa Tirta PLN	Pemenuhan supply air kpd PDAM/industri pengendalian banjir, pengendalian daerah serapan sungai, Prekuensi pemadaman, lama rata-rata pemadaman, kecepatan pelayanan gangguan.		
		Jalan Tol	Kualitas jalan, indikator traffic sign.		
		Garuda/MNA	On time performance.		
		Bandara	Kebersihan terminal bandara, sarana parkir, fasilitas check in.		
		Efisiensi produksi dan produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> > Peningkatan utilisasi faktor-faktor produksi/assets idle > Peningkatan rendemen > Peningkatan produktivitas per satuan faktor produksi > Pengurangan susut/losses, baik susut teknis, susut distribusi, maupun susut karena faktor lainnya > Peningkatan nilai men-hour > Peningkatan jam jalan rata-rata mesin (dalam batas2 toleransi) > Kewajiban melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi sesuai persyaratan standar. 	Perkebunan	Rendemen, produksi per hektar, dsb.
				Kereta Api/pelayaran/penerbangan	Load factor penumpang dan barang, penumpang-kuiton, dsb.
				PLN	Susut teknis, susut distribusi, dst.
				Pengairan (Perum Otocita Jati-luhur dan Perum Jasa Tirta	Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan (O & P).
				Konsultan	Men-hour terjual, dsb.
Pertambangan	Jam jalan kapal keruk, ekskavator, dsb.				
Pemeliharaan kon-inuitas produksi	<ul style="list-style-type: none"> > Eksplotasi SDA dengan orientasi jangka panjang > Pelaksanaan checking rutin terhadap fasilitas2 utama > Kepatuhan pengoperasian peralatan sesuai dengan batas kapasitas yang direkomendasikan > Replacement sarana dan prasarana yang sudah tidak produktif > Kreativitas dalam meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan > Penciptaan produk2 baru yang prospektif > Peningkatan penguasaan teknologi > Mutu diklat > Penyelenggaraan pendidikan formal dan informal sesuai kebutuhan (dalam negeri dan luar negeri). > Kaderisasi pimpinan > Pendelegasian kewenangan secara berjenjang. > Konsistensi pelaksanaan reward and punishment. > Proses regenerasi pimpinan. > Pengembangan metode baru yang prospektif > Hasil riset yang bermanfaat. > Perhatian perusahaan terhadap R & D. > Pencapaian sasaran. > Efisiensi dalam mencapai sasaran. > Perhatian manajemen terhadap keberhasilan penguasaan. > Kebersihan lingkungan. > Pelaksanaan AMDAL > Reklamasi > Estate regulation 			Kontraktor	Hak patent, hak cipta, temuan metode konstruksi baru, dsb.
				Industri kimia dasar	Konservasi energi, produk2 baru yang prospektif, dsb.
				Berlaku umum untuk semua sektor	Penyelenggaraan diblat sesuai kebutuhan Kaderisasi pimpinan, Peningkatan kesejahteraan.
				Berlaku umum untuk semua sektor	Kepedulian manajemen terhadap R & D.
		Berlaku umum untuk semua sektor	Kepedulian manajemen terhadap R & D.		
		Berlaku umum untuk semua sektor	Fulfillment terhadap R & D.		
		Berlaku umum untuk semua sektor	Fulfillment terhadap R & D.		
		Berlaku umum untuk semua sektor	Fulfillment terhadap R & D.		
		Berlaku umum untuk semua sektor	Fulfillment terhadap R & D.		
		Berlaku umum untuk semua sektor	Fulfillment terhadap R & D.		
Berlaku umum untuk semua sektor	Fulfillment terhadap R & D.				

PINJAMAN DALAM NEGERI DALAM BENTUK SURAT UTANG
(Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1998 tgl. 6 April 1998)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa untuk menunjang program penyehatan perbankan nasional diperlukan penghimpunan dana pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang;
2. bahwa sehubungan dengan hal tsb, perlu ditetapkan ketentuan tentang pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang dengan Keputusan Presiden.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1997 (BN No. 6118 hal. 19B) tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;
3. Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1998 (BN No. 6118 hal. 19B-20B) tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
4. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1998 (BN No. 6139 hal. 15B-16B) tentang Tugas Dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (LN Tahun 1998 No. 49);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PINJAMAN DALAM NEGERI DALAM BENTUK SURAT UTANG.

Pasal 1

- 1) Untuk kepentingan penyehatan perbankan nasional yang dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Pemerintah menerbitkan surat utang dalam negeri.
- 2) Jangka waktu pelunasan, masa tenggang, besarnya angsuran pokok, dan tingkat bunga serta cara pembayaran utang tsb. ditetapkan Menteri Keuangan.

Pasal 2

Bank Indonesia dan/atau masyarakat dapat membeli surat utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

(T)

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
(Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 1998 tanggal 1 April 1998)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perlu ditetapkan Instruksi Presiden tentang penyelenggaraan pengawasan pembangunan.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Keputusan Presiden No. 62/M Tahun 1998 (BN No. 6136 hal. 15B).

MENGINSTRUKSIKAN :

Menetapkan :

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(T)

Pasal 3

- (1) Pada tahap pertama akan diterbitkan surat utang senilai Rp. 80.000.000.000.000,- (delapan puluh triliun rupiah).
- (2) Penerbitan surat utang tahap berikutnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penerimaan surat utang sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) diperuntukan bagi pembayaran penggantian dana yang telah dikeluarkan Bank Indonesia terhadap bank-bank yang dialihkan kepada BPPN.

Pasal 4

Kewajiban yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tgl. 6 April 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tgl. 6 April 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SAADILLAH MURSJID

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1998 NOMOR 77

PT. INDOFARMA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2001 DAN 2000

PT. INDOFARMA (PERSERO) Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
DECEMBER 31, 2001 AND 2000

	2001 Rp	Catatan/ Notes	2000 Rp	
AKTIVA				ASSETS
AKTIVA LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	107.542.674.955	2d,4	90.782.232.725	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	17.741.551.406	2e,5,15	12.634.749.951	Short-term investments
Piutang usaha				Trade accounts receivable
Pihak tubungan istimewa	48.835.651.703	2f,15,37	44.433.255.649	Related parties
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu Rp 2.974.615.992 tahun 2001 dan Rp 3.794.115.992 tahun 2000	169.779.646.915	2f,6,15	78.939.249.966	Third parties - net of allowance for doubtful accounts of Rp 2,974,615,992 in 2001 and Rp 3,794,115,992 in 2000
Piutang lain-lain	4.285.765.689	7	35.650.813.212	Other accounts receivable
Persediaan	280.891.532.885	2g,8,15	159.174.178.955	Inventories
Pajak dibayar dimuka	21.588.657.064	2p,9	1.913.139.913	Prepaid taxes
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	38.295.201.402	2h,10	9.261.056.366	Advances and prepaid expenses
Jumlah Aktiva Lancar	688.960.662.019		432.788.676.767	Total Current Assets
AKTIVA TIDAK LANCAR				NONCURRENT ASSETS
Aktiva pajak tangguhan	6.583.187.935	2p,32	1.915.162.113	Deferred tax assets
Investasi jangka panjang	4.000.000.000	2e,11	9.671.033.568	Long-term investments
Aktiva tetap - setelah dikurang: akumulasi penyusutan Rp 65.381.472.831 tahun 2001 dan Rp 49.110.179.111 tahun 2000	100.585.133.945	2i,12,15,21	89.186.566.340	Property, plant and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 65,381,472,831 in 2001 and Rp 49,110,179,111 in 2000
Aktiva lain-lain	11.495.757.891	13	4.611.742.063	Other assets
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	122.664.079.771		105.384.504.084	Total Noncurrent Assets
JUMLAH AKTIVA	811.624.761.790		538.173.180.851	TOTAL ASSETS

lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements

PT. INDOFARMA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
31 DESEMBER 2001 DAN 2000 - Lanjutan

PT. INDOFARMA (PERSERO) Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
DECEMBER 31, 2001 AND 2000 - Continued

	2001 Rp	Catatan/ Notes	2000 Rp	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
KEWAJIBAN LANCAR				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman dana dari Pemerintah	55.000.000.000	14	55.000.000.000	Loan from the Government
Hutang bank	75.739.778.674	15	47.144.696.462	Bank loan
Hutang usaha				Trade accounts payable
Pihak hubungan istimewa	14.877.202.619	16,37	3.732.627.328	Related parties
Pihak ketiga	62.787.776.216	16	61.939.838.006	Third parties
Hutang lain-lain	18.975.212.520	17	11.135.416.006	Other accounts payable
Hutang pajak	29.689.452.773	2p,18	44.994.560.860	Taxes payable
Biaya masih harus dibayar	29.078.508.007	19	18.951.363.801	Accrued expenses
Kewajiban lancar lain	2.809.877.209		2.705.365.889	Other current liabilities
Hutang bank jatuh tempo dalam satu tahun	800.000.000	21	-	Current maturity of long-term bank loan
Jumlah Kewajiban Lancar	<u>289.757.608.018</u>		<u>245.005.893.351</u>	Total Current Liabilities
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR				NONCURRENT LIABILITIES
Hutang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.866.666.667	21	-	Long-term bank loan - net of current maturity
Kewajiban manfaat pekerja	<u>1.565.097.566</u>	34	-	Employee benefit obligations
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	<u>4.431.764.233</u>		-	Total Noncurrent Liabilities
HAK MINORITAS	<u>6.590.726.558</u>	22	<u>2.086.495</u>	MINORITY INTERESTS
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham				Capital stock - Rp 100 par value per share
Modal dasar - 10 miliar saham tahun 2001 dan 6,4 miliar saham tahun 2000				Authorized - 10 billion shares in 2001 and 6.4 billion shares in 2000
Modal ditempatkan dan disetor - 3.096.875.000 saham tahun 2001 dan 1,6 miliar saham tahun 2000	309.587.500.000	23	160.000.000.000	Subscribed and paid-up - 3,096,875,000 shares in 2001 and 1.6 billion shares in 2000
Tambahan modal disetor	74.651.762.426	24	-	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	8.880.477.188		27.191.022.435	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	<u>117.624.723.367</u>		<u>105.374.178.570</u>	Unappropriated
Jumlah Ekuitas	<u>510.844.462.981</u>		<u>292.565.201.005</u>	Total Equity
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	<u>811.624.761.790</u>		<u>538.173.180.851</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT. INDOFARMA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2001 DAN 2000

PT. INDOFARMA (PERSERO) Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2001 AND 2000

	2001 Rp	Catatan/ Notes	2000 Rp	
PENJUALAN BERSIH	615.425.988.567	21,25	493.371.405.137	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	<u>311.632.992.952</u>	21,26	<u>220.828.366.065</u>	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	<u>303.792.995.615</u>		<u>272.543.040.072</u>	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Penjualan	85.107.922.643	21,27	58.939.422.914	Selling
Umum dan administrasi	46.351.626.788	21,28	30.530.487.438	General and administration
Jumlah Beban Usaha	<u>131.459.549.431</u>		<u>89.469.910.352</u>	Total Operating Expenses
LABA USAHA	<u>172.333.446.184</u>		<u>183.073.129.720</u>	INCOME FROM OPERATIONS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (CHARGES)
Hasil investasi	10.051.862.817	29	6.749.605.009	Income from investments
Beban pinjaman	(10.199.034.986)	21,30	(19.907.460.041)	Borrowing costs
Kerugian kurs mata uang asing - bersih	(336.225.519)	7c	(13.456.689.272)	Loss on foreign exchange - net
Lain-lain - bersih	4.014.036.211	31	7.615.768.449	Others - net
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	<u>3.530.638.523</u>		<u>(16.998.775.855)</u>	Other Income (Charges) - Net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	175.864.084.672		166.074.353.865	INCOME BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	<u>(53.225.849.404)</u>	2p,32	<u>(55.781.798.520)</u>	TAX EXPENSES
LABA SEBELUM HAK MINORITAS	122.638.235.268		110.292.555.345	INCOME BEFORE MINORITY INTERESTS
HAK MINORITAS	<u>(96.221.620)</u>	22	<u>(1.086.495)</u>	MINORITY INTERESTS
LABA BERSIH	<u>122.542.013.648</u>		<u>110.291.468.850</u>	NET INCOME
LABA PER SAHAM DASAR	42	2q,33	44	BASIC EARNINGS PER SHARE

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
31 DESEMBER 1999, 1998 DAN 1997

	31 Desember 1999* Rp	31 Desember 1998* Rp	31 Desember 1997* Rp
AKTIVA			
AKTIVA LANCAR			
Kas dan setara kas	194,694,664,733	193,818,190,424	1,477,120,635
Investasi jangka pendek	10,662,286,560		
Piutang usaha			
Pihak hubungannya istimewa	48,969,944,240	50,802,765,653	30,539,106,152
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu Rp 4.245.733.360 tahun 2000 Rp 3.501.386.328 tahun 1999 Rp 191.355.609 tahun 1998 dan Rp 67.125.038 tahun 1997	55,337,202,602	54,647,617,330	29,280,168,246
Piutang lain-lain	9,302,596,474	1,912,839,541	95,005,116
Persediaan	91,818,027,288	113,471,057,521	29,877,785,007
Pajak dibayar dimuka			
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	9,808,644,885	6,003,012,660	1,418,605,537
Jumlah Aktiva Lancar	420,593,366,782	420,633,483,133	92,687,790,693
AKTIVA TIDAK LANCAR			
Aktiva pajak tangguhan	1,303,113,833	150,593,350	18,654,329
Investasi jangka panjang	8,157,050,986	3,172,788,663	686,082,637
Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan			
Rp 43.442.162.450 tahun 2000 Rp 38.324.635.334 tahun 1999, Rp 32.396.787.315 tahun 1998 dan Rp 26.896.302.670 tahun 1997	54,310,001,057	48,927,116,260	47,411,641,625
Aktiva lain-lain	21,026,698,574	2,778,120,595	1,639,427,147
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	84,796,864,450	55,028,618,868	49,755,805,738
Jumlah Aktiva	505,390,231,232	475,662,102,001	142,443,596,431

PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
31 DESEMBER 1999, 1998 DAN 1997

	31 Desember 1999* Rp	31 Desember 1998* Rp	31 Desember 1997* Rp
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR			
Pinjaman dana dari Pemerintah	121,750,000,000		
Hutang bank		7,500,000,000	4,520,800,204
Hutang usaha			
Pihak hubungan istimewa	395,680,000	108,253,537,333	65,600,000
Pihak ketiga	21,628,918,605	20,847,283,891	84,445,849,993
Hutang lain-lain	1,508,442,181	877,450,831	703,023,954
Hutang pajak	42,754,422,716	7,261,244,656	6,800,986,226
Bayar masih harus dibayar	22,726,150,485	48,990,974,704	5,823,795,673
Dana subsidi diterima dimuka	27,058,761,104	32,717,146,807	
Hutang dividen			3,500,000,000
Kewajiban lancar lain	980,462,607	473,545,982	199,316,494
Jumlah Kewajiban Lancar	238,802,837,986	226,921,184,224	106,068,379,514
KEWAJIBAN PIHAK LANCAR			
Pinjaman dana dari Pemerintah		121,750,000,000	
HAK MINORITAS AKTIVA BERSIH			
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham pada tahun 2000 dan Rp 1 juta per saham pada tahun 1999, 1998, dan 1997			
Modal dasar - 6,4 miliar saham pada tahun 2000 dan 350.000 saham pada tahun 1999, 1998 dan 1997			
Modal ditempatkan dan disetor - 16 miliar saham pada tahun 2000 dan 95.000 saham pada tahun 1999, 1998 dan 1997	95,000,000,000	95,000,000,000	95,000,000,000
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	41,648,298,554	15,878,815,183	4,326,389,325
Tidak ditentukan penggunaannya	110,939,092,682	36,134,102,594	13,054,827,562
Jumlah Ekuitas	247,587,391,236	147,012,917,777	112,375,216,887
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	486,390,229,232	495,684,102,001	218,443,596,431

PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
31 DESEMBER 1999, 1998 DAN 1997
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 1999, 1998 DAN 1997

	1999	1998	1997
	(Satu tahun)*	(Satu tahun)*	(Satu tahun)*
	Rp	Rp	Rp
PENJUALAN BERSIH	392,024,722,388	254,136,080,734	125,580,309,894
BEBAN POKOK PENJUALAN	209,965,383,695	142,360,185,262	76,388,291,869
LABA KOTOR	182,059,338,693	111,775,895,472	49,192,018,025
BEBAN USAHA			
Penjualan	33,277,509,281	17,959,392,882	10,465,827,890
Umum dan administrasi	22,859,214,643	14,304,762,862	9,579,822,355
Jumlah Beban Usaha	56,136,723,924	32,264,155,744	20,045,650,245
LABA USAHA	125,922,614,769	79,511,739,728	29,146,367,780
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Hasil (rugi) investasi	44,288,989,558	2,085,013,951	(4,374,405,516)
Beban pinjaman	(26,375,109,506)	(20,145,329,456)	(1,097,292,599)
Kerugian kurs mata uang asing - bersih	(3,850,784,253)	(25,979,243,206)	(1,243,861,366)
Lain-lain-bersih	16,798,052,508	(75,292,526)	(107,876,076)
Penghasilan (Beban) Lain-lain-Bersih	30,861,148,307	(44,114,851,237)	(6,823,435,587)
LABA SEBELUM (BEBAN) PAJAK	156,783,763,076	35,396,888,491	22,322,932,193
PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK			
Pajak kini	(40,927,380,100)	(13,228,755,100)	(9,286,759,000)
Pajak langguhan	1,152,520,483	131,939,021	11,813,060
Beban Pajak - Bersih	(39,774,859,617)	(13,096,816,079)	(9,274,945,940)
LABA SEBELUM HAK MINORITAS	117,008,903,459	22,300,072,412	13,047,986,253
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN	-	-	-
LABA BERSIH	117,008,903,459	22,300,072,412	13,047,986,253
LABA PER SAHAM	47	16	5

PT. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk.

NERACA

- 31 DESEMBER 2001 DAN 2000

(Dalam Rupiah)

	2001	2000
AKTIVA		
AKTIVA LANCAR		
Kas dan setara kas	357,309,526,297	176,316,747,320
Deposito berjangka	7,500,000,000	35,922,750,000
Piutang usaha - setelah dikurangi penvisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 8.478.487.076 tahun 2001 dan Rp 6.193.667.172 tahun 2000		
Pihak yang hubungan istimewa	29,897,319,530	18,122,734,492
Pihak ketiga	109,054,908,092	113,479,723,917
Piutang lain-lain	3,872,860,596	22,819,822,847
Persediaan - setelah dikurangi penvisihan sebesar Rp 1.842.331.752 tahun 2001 dan Rp 1.113.882.464 tahun	273,943,401,937	246,425,338,823
Pajak dibayar dimuka	28,474,394,262	12,141,333,744
Uang muka	6,533,925,739	9,323,090,047
Biaya dibayar dimuka	5,457,976,254	3,508,383,558
Jumlah Aktiva Lancar	822,044,312,707	638,062,924,748
AKTIVA TIDAK LANCAR		
Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istime	6,571,136,311	1,883,074,466
Aktiva pajak tanggungan	5,288,942,715	1,924,752,576
Investasi jangka panjang	4,101,031,774	4,102,560,736
Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp 112.440.227.931 tahun 2001 dan Rp 94.643.595.988 tahun 2000	318,225,023,289	290,391,780,728
Aktiva yang belum digunakan	9,246,068,998	9,246,068,998
Biaya tanggungan - hak atas tanah	1,041,588,232	1,082,702,105
Biaya tanggungan - eksplorasi dan pengembangan	9,347,523,427	10,359,146,345
Aktiva lain-lain	12,291,108,344	7,409,668,045
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	366,112,423,090	326,399,753,999
JUMLAH AKTIVA	1,188,156,735,797	964,462,678,747

PT. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk.

NERACA

31 DESEMBER 2001 DAN 2000

(Dalam Rupiah)

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2001	2000
KEWAJIBAN LANCAR		
Pinjaman dana Pemerintah RI	65,000,000,000	65,000,000,000
Hutang bank	20,311,010,266	5,101,073,105
Hutang usaha		
Pihak mempunyai hubungan istimewa	68,847,726,948	82,158,758,812
Pihak ketiga	132,521,637,161	99,682,531,153
Hutang pajak	43,575,234,530	65,404,750,439
Uang muka penjualan	20,975,099,808	51,429,110,491
Biaya yang masih harus dibayar	37,322,335,201	42,918,171,811
Pendapatan bunga diterima dimuka	2,453,271,345	-
Kewajiban lancar lain-lain	4,092,658,850	4,991,529,399
Pinjaman dana Pemerintah RI tempo dalam satu tahun	9,231,725,000	-
Jumlah Kewajiban Lancar	404,533,699,109	416,685,428,510
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR		
Program manfaat karyawan	4,987,780,799	-
Pinjaman dana dari Pemerintah RI jangka panjang	44,845,475,000	7,800,000,000
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	49,833,255,799	7,800,000,000
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham tahun 2001 dan Rp 500 per saham tahun 2000		
Modal dasar - 20.000.000.000 saham tahun 2001 dan 3.000.000.000 saham tahun 2000		
Modal ditempatkan dan disetor 5.554.000.000 saham tahun 2001 dan 750.000.000 saham tahun 2000	555,400,000,000	375,000,000,000
Tambahan modal disetor	43,579,620,031	-
Modal lain - opsi saham karyawan	129,902,977	-
Saldo Laba : Ditentukan penggunaannya	9,285,895,165	1,827,093,577
Tidak ditentukan penggunaannya	125,594,362,716	163,150,156,660
Jumlah Ekuitas	733,989,780,889	539,977,250,237
UMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,188,156,735,797	964,462,678,747

PT. KIMIA FARMA Tbk.
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2001 DAN 2000
(Dalam Rupiah)

	2001	2000
Penjualan Bersih	1.422.761.337,130	1.517.153.295,051
Beban Pokok Penjualan	909.290.050,254	963.102.043,488
Laba Kotor	<u>513.471.286,876</u>	<u>553.751.251,563</u>
Beban Usaha		
Penjualan	223.869.188,607	201.007.879,656
Umum dan administrasi	115.719.861,700	102.821.171,101
Jumlah Beban Usaha	<u>339.589.050,307</u>	<u>303.829.050,757</u>
Laba Usaha	173.882.236,569	249.922.200,806
Penhasilan (Beban) lain-lain		
Pendapatan bunga & hasil investasi	16.417.838,435	17.110.985,715
Beban bunga dan provisi	(14.072.397,568)	(18.344.934,426)
Beban kompensasi	(129.902,977)	-
Keuntungan kurs mata uang asing	(171.557,036)	782.329,868
Penurunan nilai aktiva tetap dan biaya eksplorasi & p	-	(9.777.965,903)
lain-lain - bersih	9.228.053,389	1.978.865,476
Penhasilan lain-lain - bersih	11.272.034,243	(8.250.719,270)
Laba Sebelum Pajak	185.154.270,812	241.671.481,536
Beban Pajak		
Pajak kini	(56.255.277,500)	(72.034.764,700)
Pajak tangguhan	3.364.190,139	182.259,559
Beban Pajak - Bersih	(52.891.087,361)	(71.852.505,141)
LABA BERSIH	<u>132.263.183,451</u>	<u>169.818.976,395</u>
LABA PER SAHAM DASAR	25,06	33,96

PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk.

NERACA
31 DESEMBER 2000, 1999 dan 1998

AKTIVA	2000	1999	1998
AKTIVA LANCAR			
Kas dan setara kas	176,316,747,320	186,269,471,640	262,369,143,638
Deposito berjangka	35,922,750,000	-	-
Piutang usaha -setelah dikurangi penyisihan piutang ragu - ragu sebesar Rp 6.193.667.172 tahun 2000, Rp 4.823.711.693 tahun 1999 dan Rp 4.343.424.252 tahun 1998 Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	18,122,734,492	13,927,350,786	12,229,972,897
Pihak ketiga	113,479,723,917	85,939,391,854	96,333,231,832
Piutang lain - lain	22,819,822,847	15,779,106,516	635,273,093
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan persediaan usang sebesar Rp 1.113.882.461 tahun 2000, Rp 492.516.339 tahun 1999 dan Rp 863.842.221 tahun 1998	246,425,338,823	264,804,039,065	179,727,828,924
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka	12,144,333,744	16,091,426,053	6,856,355,985
Uang muka	10,490,522,738	4,124,385,038	1,938,323,314
Biaya dibayar dimuka	2,340,950,867	2,150,657,216	1,672,534,738
Jumlah Aktiva Lancar	638,062,924,748	589,085,828,168	561,762,666,421
AKTIVA TIDAK LANCAR			
Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1,883,074,466	1,918,820,035	2,821,120,132
Aktiva pajak tangguhan	1,924,752,576	1,742,493,017	2,513,106,945
Investasi jangka panjang	4,102,560,736	4,165,846,864	6,283,504,297
Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 94.613.595.988 tahun 2000, Rp 81.334.432.145 tahun 1999 dan Rp 72.641.016.860 tahun 1998	290,391,780,728	83,792,337,839	75,487,576,100
Aktiva yang belum digunakan	9,246,068,998	9,246,068,998	9,570,488,998
Biaya tangguhan - hak atas tanah	1,082,702,105	1,124,400,851	203,381,107
Biaya tangguhan - eksplorasi dan pengembangan	10,359,146,345	11,408,271,695	1,343,937,113
Aktiva lain - lain	7,409,668,045	1,639,896,396	2,969,702,594
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	326,399,753,999	115,038,135,695	101,192,817,286
JUMLAH AKTIVA	964,462,678,747	704,123,963,863	662,955,483,707

NERACA
31 DESEMBER 2000, 1999 DAN 1998 (Lanjutan)

	2000	1999	1998
	Rp	Rp	Rp
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR			
Pinjaman dan dari Pemerintah Republik Indonesia	65,000,000,000	-	-
Hutang bank	5,101,073,105	-	18,382,973,372
Hutang usaha			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	82,158,758,812	68,580,841,400	72,569,114,468
Pihak ketiga	99,682,534,453	52,666,810,125	149,796,072,621
Hutang pajak	65,404,250,439	31,611,612,076	19,606,666,469
Uang muka penjualan	51,429,110,491	81,282,470,619	14,419,597,533
Biaya yang masih harus dibayar	42,918,171,811	67,764,919,149	39,662,963,462
Dana subsidi diterima dimuka	-	30,777,374,227	46,892,358,266
Kewajiban lancar lain - lain	4,991,529,399	2,189,726,328	2,349,755,340
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Pinjaman dana dari Pemerintah Republik Indonesia	-	111,500,000,000	-
Hutang bank		-	4,540,784,085
Jumlah Kewajiban Lancar	416,685,478,510	446,373,784,224	368,220,285,606
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			
Pinjaman dana dari Pemerintah Republik Indonesia jangka panjang	7,800,000,000	7,800,000,000	111,500,000,000
Hutang bank jangka panjang	-	-	8,122,051,404
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	7,800,000,000	7,800,000,000	119,622,051,404
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 500 per saham tahun 2000 dan Rp 1.000,000 per saham tahun 1999 dan 1998 Modal dasar - 3.000.000.000 saham terbagi atas 1 saham seri A Dwiwarna dan 2.999.999.999 saham seri B tahun 2000 dan 400.000 saham tahun 1999 dan 1998 Modal ditempatkan dan disetor - 750.000.000 saham terbagi atas 1 saham seri A Dwiwarna dan 749.999.999 saham seri B tahun 2000 dan 100.000 saham tahun 1999 dan 1998	375,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	1,827,093,577	41,173,209,630	5,323,418,858
Tidak ditentukan penggunaannya	163,150,156,660	108,776,980,009	69,789,724,839
Jumlah Ekuitas	539,977,250,237	249,950,189,639	175,113,143,697
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	964,462,678,747	704,123,973,863	662,955,483,707

LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2000, 1999 DAN
1998

	2000	1999	1998
	Rp	Rp	Rp
PENJUALAN BERSIH	1,517,153,295,051	1,059,114,594,753	783,684,799,161
BEBAN POKOK PENJUALAN	963,402,043,488	705,875,706,749	524,486,019,720
LABA KOTOR	553,751,251,563	353,238,888,004	259,198,779,441
BEBAN USAHA			
Penjualan	184,885,980,615	141,615,841,818	99,968,127,553
Umum dan administrasi	118,943,070,142	108,778,269,646	68,709,224,227
Jumlah Beban Usaha	303,829,050,757	250,394,111,464	168,677,351,780
LABA USAHA	249,922,200,806	102,844,776,540	90,521,427,661
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN - LAIN			
Beban bunga dan provisi bank	(18,344,934,426)	(29,192,053,463)	(31,682,921,567)
Hasil investasi	15,074,685,130	51,779,822,737	37,487,089,072
Penurunan nilai aktiva tetap dan biaya eksplorasi dan pengembangan	(9,777,965,903)	(242,093,945)	(955,026,606)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	782,329,868	1,933,352,339	(3,849,993,072)
Lain-lain bersih	4,015,166,061	9,940,486,238	5,901,269,794
Penghasilan (Beban) Lain - lain - Bersih	(8,250,719,270)	34,219,513,906	6,900,417,621
LABA SEBELUM PAJAK	241,671,481,536	137,064,290,446	97,421,845,282
BEBAN PAJAK			
Pajak kini	72,034,764,700	38,047,820,500	25,598,883,000
Pajak tangguhan	(182,259,559)	770,613,928	953,376,914
Beban Pajak - Bersih	71,852,505,141	38,818,434,428	26,552,259,914
LABA BERSIH	169,818,976,395	98,245,856,018	70,869,585,368
LABA PERSAHAM DASAR	33.96	19.65	14.17

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 2 April 2001, ditentukan laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000 masing - masing sebesar Rp 125.789.980.853 dan Rp 37.360.175.807 sebagai saldo laba yang ditentukan penggunaannya dan dividen tahun buku 2000, serta saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 125.000.000.000 dikapitalisasi untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sesuai RUPS Luar Biasa tanggal 2 April 2001.